

Reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati Terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer Kabinet Hatta Tahun 1948

Siti Nur Masitoh¹, Henry Susanto², Suparman Arif³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

e-mail: sitinurmasitoh22@gmail.com, HP. 082176793278

Received : November 09, 2018 Accepted: November 15, 2018 Online Publish: November 21, 2018

Abstract: *Reaction of Panembahan Senopati Division IV Towards Reorganization and Rationalization Military at Hatta Cabinet in 1948. The focus of the problem in this research are reaction of Panembahan Senopati Division IV towards reorganization and rationalization military. The purpose of this research is to knowing about internal conflict in Indonesian military on 1948. The methods that used in this research is historical methods, there are: heuristic, critic, interpretation, and historiography. Theoretical framework that used to explain the problem are positive reaction and negative reaction to implement reorganization and rationalization military. The conclusion in this research are reorganization and rationalization bring a harm impact for those follow (left wing) ideology, the particular military is Panembahan Senopati Division IV.*

Keywords: *conflict, intern, military*

Abstrak: **Reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati Terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer Kabinet Hatta Tahun 1948.** Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap reorganisasi dan rasionalisasi militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik internen yang terjadi dalam tubuh militer Indonesia tahun 1948. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yang meliputi langkah-langkah : heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kerangka teoritis yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat adalah reaksi positif dan negatif dalam pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi militer. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah reorganisasi dan rasionalisasi merugikan sebagian kesatuan militer yang berhaluan kiri, khususnya Divisi IV/Panembahan Senopati.

Kata kunci: interen, konflik, militer

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, sangat membutuhkan adanya kekuatan militer. Pada tanggal 5 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah maklumat untuk membentuk "Tentara Keamanan Rakyat". Setelah TKR terbentuk, pemerintah menghendaki berdirinya partai-partai.

Terdapat partai dengan aliran Nasionalis (Kebangsaan), Agama, Komunis, Sosialis, Liberal dan sebagainya. Setelah berdirinya partai-partai itu dengan suasana perjuangan yang terjadi maka partai-partai tersebut kemudian membentuk badan kelasykaran. Sehingga disamping TKR sebagai tentara resmi seolah-olah ada tentara partikelir.

Pada saat Amir Syarifuddin menjadi Menteri Pertahanan, Sayap Kiri mulai melakukan infiltrasi kedalam tubuh militer. Amir membentuk Staf Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), tujuannya ialah untuk mengenalkan kepada para prajurit agar tahu cara berpolitik, namun berpolitik disini ialah politik yang berhaluan "Sayap Kiri" (Ulf Sundhaussen 1986 : 46)".

Staf Pepolit ini secara kepengurusannya di dominasi oleh Divisi IV. Pepolit dianggap sebagai media penyebaran ideologi komunis di dalam tubuh militer. Akibatnya aktivitas Pepolit ini merosot di daerah-daerah. Tindak lanjut daripada reorganisasi Pepolit yaitu dibentuknya lembaga baru yaitu Biro Perjuangan. Biro perjuangan adalah pelaksana dari Kementerian Pertahanan yang bertugas menampung sejumlah lasykar-lasykar yang semula di dirikan oleh partai-partai politik.

Setelah dibubarkannya Biro Perjuangan, Amir Syarifudin membentuk TNI Masyarakat pada bulan Agustus 1947, yang mana personilnya adalah sebagian besar lasykar berideologi komunis yang tidak ingin di lebur kedalam TNI reguler (Ulf Sundhaussen 1986 : 44).

Begitu cerdik kader-kader PKI menyusup, sehingga banyak prajurit TNI yang terpengaruh ajaran dan propaganda komunis. Bahkan adapula kesatuan-kesatuan TNI yang secara terang-terangan berpihak pada PKI. Misalnya seperti Brigade Martono, Brigade 29 pimpinan Kolonel Sumarsono, Tentara Laut RI (TLRI) pimpinan Ahmad Yadau dan lain-lain. Mereka itu sebagian besar anggota lasykar PKI (Syamsuar Syaid 1985 : 12).

Akibat dari Perjanjian Renville, Amir kehilangan dukungan di parlemen dan membuat dirinya mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Pasca pengunduran diri Amir Syarifuddin, Presiden menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membentuk kabinet baru. Selaku ketua kabinet Hatta mencanangkan empat program, dua diantaranya ialah melanjutkan Perjanjian Renville dan melaksanakan rasionalisasi di lingkungan angkatan perang (B.A. Shaleh 2007 : 35-36).

Pada masa pemerintahan Kabinet Hatta ia melaksanakan kebijakan rasionalisasi. Tujuan dari rasionalisasi secara aspek politik adalah hendak memotong-motong garis pengaruh Amir Syarifudin di kalangan Angkatan Perang dan lasykar bersenjata, dengan cara demikian Hatta bermaksud hendak membersihkan Angkatan Perang dari pengaruh golongan politik tertentu (Sayap Kiri).

Banyak pasukan militer yang menolak melaksanakan program ini, bahkan tidak jarang mereka melawan dengan konfrontasi senjata seperti yang terjadi di Solo atau beberapa daerah lainnya. Penolakan terhadap langkah-langkah reformasi pemerintah dibidang kemiliteran, yang paling kuat dipelihatkan di Kabupaten Surakarta, Jawa Tengah yaitu oleh kesatuan-kesatuan yang berada didalam atau berkaitan erat dengan Divisi Keempat (Senopati) yang berada dibawah pimpinan Mayor Jendral Sutarto (David Charles Anderson 1974 : 13).

Reaksi keras atas rencana demobilisasi Hatta ditunjukkan oleh kesatuan divisi militer di Surakarta yaitu Divisi IV/Panembahan Senopati. Sikap penolakan mereka atas program rasionalisasi tidak lepas dari adanya pengaruh haluan politik FDR/PKI didalam tubuh angkatan perang.

Pemerintah mendapatkan tantangan yang sangat berat dari pihak bangsa Indonesia khususnya dari kesatuan militer sendiri. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap reorganisasi dan rasionalisasi militer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu penelitian. Metode merupakan cara atau jalan yang sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Husin Sayuti, 1989 : 32).

Berdasarkan permasalahan dan penelitian yang dilakukan,

penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian historis atau sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Louis Gottschalk, 1975: 32). Dalam pelaksanaan metode sejarah, terdapat empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

1. Heuristik : Tahap ini peneliti mencari, mengumpulkan data-data, dan fakta-fakta yang diperlukan dalam penelitian dengan cara mencari buku, arsip, dokumen. Tahap ini mencari data dengan sumber tertulis maupun lisan. Sumber tertulis yaitu dilakukan dengan cara mengunjungi instansi-instansi seperti di Perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah Lampung, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
2. Kritik sumber : setelah data berhasil terkumpul selanjutnya peneliti melakukan kritik terhadap sumber yang ditemukan, dengan melakukan kritik ekstern maupun intern kemudian.
3. Interpretasi : merupakan tahapan memberi penafsiran terhadap informasi-informasi yang telah didapatkan dari berbagai sumber dan dirangkai menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal.
4. Historiografi : merupakan tahap terakhir dalam langkah-langkah metode historis yaitu penulisan sejarah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitiannya.

Pada penelitian kali ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Kepustakaan

Menurut Mestika Zed, metode kepastakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2004 : 4). Berdasarkan pendapat ahli di atas maka teknik kepastakaan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan melalui studi pustaka di Perpustakaan Daerah Lampung dan Perpustakaan Universitas Lampung sebagai langkah penting dalam penelitian.

2. Teknik Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:206), teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, biografi, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *lengger*, agenda dan lain sebagainya.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Sugiyono, teknik analisis data adalah suatu tahapan atau cara pada proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam teknik analisis data antara lain Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan komunis dalam menarik simpati dan dukungan dari kesatuan militer sudah mulai terlihat

sejak Amir Syarifudin menjadi Menteri Pertahanan. Melalui pembentukan Staf Politik Pendidikan Tentara (Pepolit), Biro Perjuangan dan TNI Masyarakat Amir Syarifudin berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa kesatuan militer.

Pada sebelumnya, Divisi IV merupakan kesatuan militer yang sangat aktif di Staf Politik Pendidikan Tentara pada tahun 1946-1947, yaitu pada saat Kementerian Pertahanan di pegang oleh Amir Syarifudin.

Kecerdikan kader-kader PKI menyusup dalam angkatan perang, menyebabkan banyak prajurit TNI yang terpengaruh ajaran dan propaganda komunis. Bahkan adapula kesatuan-kesatuan TNI yang secara terang-terangan berpihak pada PKI.

Kesatuan militer tersebut misalnya seperti Brigade Martono, Brigade 29 pimpinan Kolonel Sumarsono, Tentara Laut RI (TLRI) pimpinan Ahmad Yadau (Komandan Brigade VII/Komando Pertempuran Panembahan Senopati) dan lain-lain. Mereka itu sebagian besar anggota lasykar PKI (Syamsuar Syaid 1985 : 12).

Upaya Menjaga Netralisasi Tentara dengan Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer

Netralisasi merupakan hal menjadikan sesuatu untuk netral baik dalam negara, sipil, militer supaya tidak terikat dengan suatu golongan atau ideologi tertentu. Pemerintah berupaya membentuk netralisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan cara melakukan Reorganisasi dan Rasionalisasi militer (Rera) di dalam angkatan perang dari pengaruh unsur-unsur ideologi dari lasykar-

lasykar perjuangan sebagai cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Berkaitan dengan tentara, tujuan dasar kebijaksanaan rekonstruksi dan rasionalisasi adalah untuk mengurangi jumlah personil angkatan bersenjata, meningkatkan efisiensinya, dan menempatkan kembali dibawah pimpinan pemerintah (Ulf Sundhaussen 1986 : 63-64).

Tujuan Reorganisasi dan Rasionalisasi

Tujuan dasar kebijaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi itu adalah untuk mengurangi jumlah personil angkatan bersenjata, meningkatkan efisiensinya, dan menemukannya kembali di bawah komando pemerintah (Ulf Sundhaussen 1986 : 63-64).

Tujuan reorganisasi dan rasionalisasi jika dilihat dari aspek politik ialah, Hatta hendak memotong-motong garis pengaruh Amir Syarifudin di kalangan angkatan perang dan lasykar bersenjata. Demikian cara ini dilakukan Hatta hendak bermaksud membersihkan Angkatan Perang dari pengaruh golongan politik Sayap Kiri (Himawan Soetanto 1995 :115).

Proses Pelaksanaan Reorganisasi dan Rasionalisasi

Kebijakan Rera kemudian dilaksanakan berdasarkan pada : Penetapan Presiden No. 9 tanggal 27 Februari 1948; Undang-Undang No. 3 tanggal 5 Maret 1948; Penetapan Presiden No. 4 tanggal 4 Mei 1948.

Reorganisasi dan Rasionalisasi Berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 Tahun 1948

Keberadaan Reorganisasi dan Rasionalisasi ini pada bidang

kepangkatan tentara diadakan penyesuaian. Pangkat-pangkat tentara diturunkan setingkat, agar antara pangkat dan jabatan terdapat keseimbangan. Sejumlah perwira akan diberhentikan dari jabatan dan diangkat sebagai perwira cadangan.

Jumlah Divisi TNI diperkecil, dilebur menjadi satu Divisi dan TNI Masyarakat dibubarkan. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden RI No. 9/1948, Panglima Divisi Siliwangi Jendral Mayor A.H Nasution diangkat menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Mobil (Himawan Soetanto 1995 :115).

Reorganisasi dan Rasionalisasi Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1948

Pelaksanaan Reorganisasi dan Rasionalisasi kemudian dilaksanakan dalam dua tingkatan. Tingkat pertama ialah rekonstruksi kesatuan-kesatuan dan Pucuk Pimpinan TNI yang ditugaskan kepada Komodor Suryadharma yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang.

Berkaitan dengan pelaksanaan Reorganisasi dan Rasionalisasi militer pada tingkatan kedua, maka diusulkan untuk membentuk dua jenis pasukan infantri yang berbeda, yakni "Pasukan Pertahanan Territorial" dan "Pasukan Tempur Mobil".

Pasukan pertahanan territorial terdiri dari prajurit-prajurit yang berasal dari daerah yang harus mereka pertahankan itu sendiri. Tugas mereka adalah untuk melancarkan serangan kecil-kecilan, menjamin perbekalan bagi pasukan tempur mobil, mempertahankan kehadiran RI dan menjamin selamat organ administratifnya, serta melatih

para pemuda. Berbeda dengan pasukan tempur mobil yang perlu dipersenjatai dengan lengkap dan ditugaskan untuk melancarkan serangan besar-besaran yang bergerak cepat memasuki daerah federal yang dikuasai Belanda (Ulf Sundhaussen 1986 : 68)".

Pokok-pokok reorganisasi yang sudah disiapkan kemudian diumumkan pada tanggal 25 Februari 1948 adanya instruksi Panglima Besar tentang "Rekontruksi Kesatuan-kesatuan Mobil dan Teritorial" (perintah harian No.37) antara lain berisikan pembentukan 3 Divisi "Renville" masing-masing:

1. Divisi I :
Gabungan dari Divisi II dan III lama, ditambah Brigade Kelasykaran dan Kesatuan Tentara Laut RI, dengan wilayah tanggung jawab : Kedu, Yogyakarta dan sisa Banyumas.
2. Divisi II :
Gabungan dari Divisi IV lama, Resimen Pati (Sunandar) dari Divisi V lama, Brigade Kelasykaran dan TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia), dengan wilayah tanggung jawab : Surakarta, Semarang dan Pati dengan satu brigade harus menyusup ke Semarang.
3. Divisi III :
Gabungan dari sisa Divisi V lama dan VI lama serta Brigade Kelasykaran dan TLRI.
Tiga brigade harus menyusup masing-masing ialah : a. Satu Brigade ke Surabaya; b. Satu Brigade ke Malang; c. Satu Brigade ke Besuki.
4. Divisi Siliwangi :
Mereka dijadikan satu badan otonom dari Kesatuan *Reserve Umum* (KRU) dan terbagi atas

tiga Brigade, masing-masing : a. Dua brigade untuk diselundupkan ke Jawa Barat Utara dan Selatan; b. Satu brigade untuk kesatuan teritorial (Himawan Soetanto 1995 : 15-16).

Penentangan Terhadap Pelaksanaan Reorganisasi dan Rasionalisasi

Oposisi dari dalam terhadap program Rera ialah berasal dari kesatuan-kesatuan yang berbasiskan orang-orang Jawa di Surakarta dan Kediri, yang merasa tidak puas karena adanya sekelompok perwira staf umum yang memiliki keistimewaan sosial tertentu, yang sebagian besar berasal dari beberapa kota kosmopolitan di Indonesia dan dipenuhi oleh perwira militer berlatar belakang pendidikan Belanda (David Charles Anderson 1974 : 11).

Kesatuan-kesatuan di Surakarta bukan saja tersingkirkan dari piramida kekuasaan dan akselerasi kenaikan pangkat yang lebih tinggi, namun bahkan mereka merasa tidak aman kedudukannya di wilayah mereka sendiri, ketika pasukan Siliwangi telah disertai pelaksanaan tugas-tugas kebijakan umum dalam wilayah Republik, di samping itu, yang membuat pasukan regional Jawa (Surakarta) merasa khawatir dengan arah ideologi yang dibawakan oleh kabinet dan para pendukung militernya terhadap angkatan bersenjata (David Charles Anderson 1974 : 11).

Selain penentangan dari kesatuan militer sendiri, program Rera menjadi ancaman keras bagi Front Demokrasi Rakyat, pimpinan Amir dan para tokoh sayap kiri. Alasannya, program rasionalisasi Hatta ini mengakibatkan suatu pengikisan bertahap atas dasar

kekuatan FDR di dalam angkatan perang.

Pelaksanaan Rera di Surakarta, khususnya kesatuan-kesatuan Divisi IV/Panembahan Senopati mendapat tantangan yang keras karena pimpinan divisi terpengaruh haluan politik FDR. Divisi IV/Senopati jumlahnya 5000 orang, separuh dari anggotanya termasuk dalam ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia). Pengaruh FDR dalam Divisi IV ini memang sangatlah kuat, banyak pasukannya merupakan formasi-formasi bersenjata dari Pesindo (Himawan Soetanto 1995 : 116).

Reaksi Divisi IV/Senopati Terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer

Pada kamus sosiologi, respon/reaksi diartikan sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa suatu kelompok melakukan sebuah reaksi atau respon adalah akibat dari aksi / rangsangan sebelumnya (Soerjono Soekanto, 1993 : 328)..

Divisi Senopati yang berjumlah 5000 orang, separuh dari anggotanya termasuk dalam ALRI. Organisasi ini sangat memadai untuk mendapat prioritas tinggi dalam program rasionalisasi. Pengaruh FDR didalam divisi ini sangatlah kuat, banyak pasukannya merupakan formasi-formasi bersenjata dari Pesindo. Sehingga pada waktu rasionalisasi Komandan Divisi IV ini meminta waktu dan bahkan menolak proses demobilisasi atas perintahnya sendiri (George Mc Turnan Kahin 1995 : 335). Adapun bentuk reaksi

negatif yang mereka tunjukkan untuk menolak program pembaharuan Hatta adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS)

Divisi IV/Panembahan Senopati menolak peleburan mereka kedalam divisi baru dan lebih memilih untuk mengabaikan rencana asli yang diajukan oleh Kabinet Hatta melalui Wakil PBAP (A.H Nasution). Mereka justru mengelompokkan diri bersama anggota lasykar lainnya kedalam formasi baru yang mereka namai dengan "Komando Pertempuran Panembahan Senopati".

Reaksi penolakan Divisi IV/Senopati untuk dimobilisasi semakin mereka tunjukkan secara gamblang dengan merubah namanya menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) yang terdiri dari pasukan TLRI (Ahkmad Yadau), Pesindo, dan Brigade 29 TNI Masyarakat dengan Kolonel Sutarto sebagai panglimanya, terbagi atas empat brigade masing-masing dipimpin oleh Letkol Soeadi, Letkol S.Soegiarto, Letkol Ahmad Yadau, dan Letkol Soejoto (Himawan Soetanto 1995 : 116).

Perubahan formasi tersebut benar-benar menunjukkan bahwa Divisi IV/Panembahan Senopati menolak rencana yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan mengenai pembentukan tentara kelas mobil dan territorial yang terancang pada program reorganisasi dan rasionalisasi yang diajukan oleh Wakil Panglima Besar Angkatan Perang. Jika dilihat dari latar belakang keanggotaan Divisi IV Panembahan Senopati yang mana banyak terdiri dari prajurit *eks* PETA

yang jika dibandingkan secara kemampuan militernya dengan prajurit *eks* KNIL mereka sedikit kurang terlatih.

2. Demostrasi Militer

Reaksi lokal atas langkah-langkah rencana demobilisasi dapat terlihat pada tanggal 20 Mei 1948 digelar suatu pertunjukan militer besar-besaran di Solo oleh sejumlah batalyon bersenjata berat dari Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI).

Upaya mereka untuk menentang rencana demobilisasi tersebut semakin mengarah kepada cara-cara perlawanan terbuka. Setelah mengubah diri menjadi formasi baru, Divisi IV yang kini menjadi KPPS melakukan tindakan parade militer yang didalamnya bermaksud untuk menolak atas rencana rasionalisasi Kementerian Pertahanan.

Pagelaran diselenggarakan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun pergerakan nasional Indonesia ke-40 di kota ini, tidak diragukan lagi pertunjukan tersebut merupakan isyarat-isyarat pembangkangan terhadap Kabinet Hatta dan kebijakan - kebijakannya (Himawan Soetanto 1995 : 122).

Adanya dukungan terhadap kelangsungan kepemimpinan Sutarto atas Divisi IV Panembahan Senopati, dan demonstrasi diakhiri dengan tuntutan agar pemerintah membatalkan pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi militer. Hal ini beralasan karena waktunya yang tidak relevan pada saat negara sedang menghadapi tekanan permasalahan baik dari dalam maupun luar negeri, namun juga mengancam keberhasilan gerakan

kemerdekaan, yang akan merusak sifat kesatuan dan demokratis angkatan bersenjata di wilayah Solo (David Charles Anderson 1974 : 15).

3. Kerusuhan Surakarta Tahun 1948

Peristiwa ini melibatkan Mayor Slamet Riyadi dan dua Batalyon *eks* TLRI dengan pasukan Siliwangi kompi Lucas (Kompi Pengawalan Brigade Siliwangi II dibawah pimpinan Kapten Oking) dan dibantu oleh Kompi Komir dari Batalyon 2/Brigade II Siliwangi. Penyerangan mendadak terhadap asrama Siliwangi dilakukan dari manuver latihan pasukan Mayor Slamet Riyadi. Serangan ini didahului dengan keluarnya ultimatum dari Komando Pertempuran Panembahan Senopati untuk melepaskan perwira-perwiranya yang ditahan di markas Srambatan.

Pasukan Siliwangi di Srambatan merasa tidak terlibat dengan penculikan perwira-perwira dari Divisi Senopati, oleh karena itu, ultimatum tidak dilaksanakan. Kecurigaan mengarah pada Siliwangi karena penculikan perwira-perwira Panembahan Senopati terjadi di dekat Srambatan dimana para tawanan lain juga ditahan disana, dan sepeda dari kelima perwira itu juga ditemukan di dekat Srambatan.

Sampai batas waktu yang ditentukan, tidak mendapat jawaban atas ultimatum yang dikeluarkan maka Letnan Kolonel Soeadi memerintahkan Mayor Slamet Riyadi selaku Komandan Brigade V Panembahan Senopati dan dua Batalyon dari TLRI untuk mempersiapkan diri mengepung asrama Srambatan. Pasukan Panembahan Senopati yang sudah bersiap di bawah pimpinan Mayor

Slamet Riyadi menyerang asrama Siliwangi di Srambatan. Tidak dapat dielakkan lagi, terjadi pertempuran sengit antara keduanya. Pertempuran melibatkan Batalyon TLRI di bawah Tarno Tjakil dari Biro Perjuangan dan dibantu Komando Pertempuran Surakarta. Pertempuran berlangsung dari pukul 13.00 - 18.00 diakhiri dengan perintah *case fire* penghentian tembak-menembak yang dikeluarkan langsung oleh Panglima Besar Sudirman dan setelah Jaksa Agung berhasil menemui pimpinan tentara dan sipil untuk mengadakan perundingan yang kemudian menghasilkan pengumuman bersama Dewan Pertahanan Daerah Surakarta No. 12 tahun 1948.

Pada saat tembak-menembak berhenti, pasukan Senopati mencari perwira-perwira mereka yang ditahan, tetapi tidak ditemukan. Pasukan Siliwangi tidak lagi hanya bertahan, tetapi juga mulai melakukan serangan dengan meminta bantuan dari Batalyon Siluman Merah pimpinan Mayor Achmad Wiranatakusumah, Batalyon Guntur/Brigade Siliwangi I pimpinan Mayor Daeng Mohammad, Hizbullah, Barisan Banteng, dan Tentara Pelajar.

Pertempuran terjadi lewat tengah hari dengan melibatkan Kompi Lukas yang bertahan di Srambatan meluas ke Panasan dan Tasikmadu dibantu tiga batalyon dari Yogyakarta melawan Batalyon Digo dari KPPS dan Batalyon 2 Resimen Jadau yang pro FDR. Pasukan Siliwangi berhasil menguasai Kota Solo pada 17 September 1948. Konflik di Surakarta tidak hanya antara Pasukan Siliwangi dan Senopati saja, tetapi juga yang mendukung kedua belah pihak.

Misalnya saja, Barisa Benteng bertrok dengan Pesindo yang mendukung FDR. Penggrebakan terjadi pada 9 September 1948 di markas besar Pesindo oleh gerombolan yang diduga Barisan Benteng, menculik 12 orang dan mencuri dokumen-dokumen penting. Dugaan itu kemudian memunculkan aksi balas dari Pesindo dengan menculik Dr. Moewardi pada 13 September 1948; menculik Citromargoso dan Darmosalimin pada 14 September 1948 yang di balas oleh Barisan Benteng dengan menghancurkan markas Pesindo di Singosaren dan di Gladag serta menghancurkan kekuatan dan menguasai markas Pesindo.⁴³ Penculikan, Penggrebakan dan pelucutan senjata mewarnai kota Surakarta selama September 1948.

Konflik kedua kesatuan berjalan seiring perkembangan situasi dan gejolak politik pemerintahan dan pergerakan FDR yang kemudian secara matang telah mempersiapkan pemberontakan terhadap Republik di Madiun.

4. Madiun Affair 1948

Peristiwa-peristiwa bentrokan bersenjata yang terjadi di Surakarta pada tanggal 13 September – 17 September 1948 antara kesatuan Brigade II/Siliwangi bersama dengan pasukan yang Pro Pemerintah (Barisan Banteng, Hizbullah, Tentara Pelajar) melawan kesatuan Panembahan Senopati hingga mendesak pasukan “tuan rumah” keluar dari kota Solo.

Terpukul mundurnya pasukan Panembahan Senopati dibawah pimpinan Soeadi dan kesatuan Pesindo yang tersisa dari kota Surakarta telah membuat para pemimpin dimarkas besar pusat organisasi di Madiun makin tidak tenteram.

Pada tanggal 18 September 1948 Gatot Subroto selaku Gubernur Militer kala itu memberikan pengumuman bahwa semua pertempuran harus dihentikan selambat-lambatnya tanggal 20 September 1948.

Sebenarnya, pengumuman tersebut lebih ditujukan kepada sisa-sisa pasukan Divisi Senopati yang telah berantakan mundur ke Purwodadi. Pasukan PPS yang terpukul mundur tersebut mengalami demoralisasi. Jika mereka tidak mengindahkan perintah tersebut, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat yang dituduh telah menimbulkan kekacauan. Namun jika mereka menghadiri pertemuan tersebut, maka hanya akan membawa diri pada penyerahan tanpa syarat kepada pemerintah (David Charles Anderson 1974 : 47).

Sebelum para pemimpin Panembahan Senopati dapat mengambil keputusan untuk memilih salah satu diantara pilihan-pilihan yang seluruhnya tidak menyenangkan tersebut, mereka telah mengambil keputusan yang telah terjadi tanggal 18 September dini hari di Madiun.

Bagi para pemimpin tertinggi Pesindo, yang sudah menolak mematuhi perintah demobilisasi dari pemerintah, pasti sudah kelihatan bahwa mata dadu sudah dilemparkan, dan kini mereka hanya punya dua alternatif, yaitu:

1. Mematuhi perintah demobilisasi dari Negara yang berarti mengorbankan kedudukan pribadi mereka, juga mengorbankan sumber besar ari kekuatan militer revolusioner PKI baru; atau
2. Mengambil prakarsa sendiri dan memulai tahap revolusioner

strategi PKI mempertahankan posisi-posisi yang sedang mereka pegang dan prospek-prospek revolusi PKI yang mereka yakini hasilnya bakal menjadi kunci masa depan jangka panjang (George Mc Turnan Kahin 1995 : 368).

Kolonel Soemarsono dan para pemimpin tertinggi Pesindo lainnya di wilayah Madiun memilih cara yang terakhir. Kekalah-kekalahan militernya di Solo merupakan suatu *set back* bagi PKI. Kolonel Soemarsono telah memperhitungkan, bahwa pemerintah saat itu telah mengirimkan suatu TNI ke Madiun untuk mengejar pelarian kesatuan militer dari Surakarta. Oleh karena itu, ia berpendirian dari pada didahului lebih baik mendahului, dengan demikian kekalahn yang terjadi di Surakarta tidak akan terulang kembali.

Keputusan-keputusan yang demikian menentukan ini terkesan diambil tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, hanya sebuah improvisasi yang tergesa-gesa, dan ini dibuat dari sebuah posisi kelemahan taktis secara militer, bukannya posisi yang kuat. Disamping itu, keputusan ini diambil sepenuhnya oleh Pesindo dan para kader FDR di Madiun dan bukan oleh para pemimpin oposisi nasional yang pada saat itu sedang berkampanye keliling Jawa (David Charles Anderson 1974 : 61-62)".

Prakarsa itu sudah lepas dari tangan mereka. Keputusan tentang taktik apa yang akan diambil selanjutnya sudah dipegang oleh para pemimpin Pesindo dan Divisi IV/Panembahan Senopati yang Pro PKI. Pada tanggal 18 September dini hari di Redjoagung (utara Madiun) yang dipimpin oleh Pesindo sudah

siap melancarkan aksi-aksi militer (George Mc Turnan Kahin 1995 : 363). Aksi ini diperkeruh dengan Soemarsono selaku Gubernur Militer Madiun atas nama Pemerintah Rakyat Madiun menyatakan bahwa mereka tidak lagi terikat pada pemerintah RI dan membentuk Republik Rakyat Indonesia (Himawan Soetanto 1985 : 145).

Pemimpin-pemimpin PKI kala itu benar-benar dihadapkan pada *fait accompli* (keadaan yang harus dihadapi / ketentuan yang harus diterima). Mereka harus merubah rencana yang semula berkampanye untuk mendapatkan dukungan masa rakyat melalui cara politik berubah menjadi cara revolusioner yang sudah dilancarkan secara dini oleh Divisi IV/Panembahan Senopati dan markas besar Pesindo di Madiun.

Peristiwa Madiun sudah terjadi maka Musso, Syarifuddin, Setiadjud, Wikana, jelas akan mengajukan alasan bahwa mereka tidak punya pilihan lain kecuali ikut serta dalam tahap revolusioner ini dan memanfaatkan sebaik mungkin (George Mc Turnan Kahin 1995 : 371).

Pemberontakan kesatuan-kesatuan militer di Madiun tidak berumur panjang, karena keesokan harinya pada tanggal 19 September 1948 tepatnya pukul 20.00 WIB Presiden Soekarno berpidato pada sebuah siaran radio yang meminta kepada rakyat untuk memilih antara pemerintah Soekarno-Hatta yang sah atau Musso. Hal ini menyebabkan mereka tersudut dan secara telak revolusi yang mereka lakukan gagal.

Pada keesokan harinya Perdana Menteri Hatta berpidato di depan sidang BPKNIP. Ia meminta agar BPKNIP menyetujui pelimpahan kekuasaan sepenuhnya

kepada presiden. Sejak saat itu Negara dinyatakan dalam keadaan bahaya.

Pada lain pihak, setelah bersidang 2 hari, akhirnya kabinet memutuskan bahwa pemborontakan di Madiun harus segera di tumpas, untuk itu pemerintah menugaskan Panglima Besar Angkatan Perang (Jendral Sudirman) (Syamsuar Said – Supriyono Priyanto 1985 : 45).

Pada tanggal 30 September 1948 kesatuan-kesatuan Siliwangi merebut kota Madiun. Operasi pembersihan terus berlangsung sampai Desember 1948. Banyak pemimin komunis, baik sipil maupun militer tewas dalam pertempuran. Sedangkan Amir Syarifuddin dan Musso ditembak mati. Kebanyakan perwira dan prajurit yang terlibat dalam Peristiwa Madiun dipecah dari tentara dalam tindakan yang pertama dari serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membersihkan TNI dari unsur-unsur ekstremis dari pihak manapun (Ulf Sundhaussen 1986 : 72)".

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah berupaya membentuk netralisasi TNI dari pengaruh politik sayap kiri melalui kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer.

PKI menyikapi adanya Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer dengan menggerakkan provokasi-provokasi kepada TNI yang dirasionalisasi. Divisi IV/Panembahan Senopati yang memiliki hubungan dekat dengan para tokoh sayap kiri memilih untuk mengabaikan bahkan menentang program Reorganisasi dan Rasionalisasi.

Reaksi yang mereka lakukan tidak lain adalah karena program Rera Hatta mereka anggap sangat merugikan mereka dan menguatkan kesatuan militer Divisi Siliwangi yang menimbulkan sikap anomi, dan persaingan dalam angkatan perang, serta memuncak pada terjadinya konflik yang bersifat destruktif.

Reaksi negatif yang dilakukan kesatuan militer Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer sebagai berikut:

1. Pembentukan Komando Pertempuran Panembahan Senopati
2. Demonstrasi Militer
3. Kerusuhan Surakarta
4. Affair Madiun

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, David Charles. 1974. *Peristiwa Madiun 1948 "Kudeta atau Konflik Internal Tentara?"*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta; Bina Aksara.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah (Terjemahan)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kahin, George Mc Turnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saleh, B.A. 2007. *Mohammad Hatta*. Bandung: CV. Citra Prayta.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agus.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetanto, Himawan. 1995. *Perintah Presiden Soekarno "Rebut Kembali Madiun"*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.
- Syaid, Syamsuar & Supriyono Priyanto. 1985. *Menumpas Tentara Merah (Gerakan Operasi Militer I di Madiun)*. Semarang: Mandira Jaya Abadi.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.